



LAPORAN KEGIATAN DAN POLICY BRIEF

RoundTable Discussion

Menghitung Risiko dan Harapan Super Holding BUMN Danantara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Diskusi Meja Bundar “Menghitung Risiko dan Harapan Super Holding Danantara” yang diselenggarakan pada 16 Desember 2025 di Yogyakarta dapat terlaksana dengan lancar dan menghasilkan berbagai pemikiran strategis yang sangat berharga. Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi resmi atas keseluruhan rangkaian acara, termasuk paparan para narasumber, pandangan pemangku kepentingan, serta rekomendasi kebijakan yang muncul dari proses diskusi.

Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian program Round Table Discussion di sepuluh kota di Indonesia yang diinisiasi oleh Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored, dengan dukungan AFU.ID, PatraData Research and Consulting, beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta, BPD HIPMI DIY serta berbagai mitra strategis lainnya. Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, BUMN, serta masyarakat sipil untuk membahas secara terbuka arah reformasi BUMN, terutama dalam konteks pembentukan Danantara sebagai entitas baru superholding BUMN.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada Nagara Institute atas pemaparan riset mendalam yang menjadi fondasi diskusi, serta kepada perwakilan pemerintah daerah, akademisi dari berbagai perguruan tinggi serta mitra strategis lainnya atas kontribusi pemikiran yang sangat bernilai.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan publik yang membutuhkan rujukan terkait perkembangan reformasi BUMN dan implikasinya terhadap pembangunan daerah. Kami berharap dialog seperti ini dapat terus diperluas dan menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Yogyakarta, Desember 2025

Panitia Penyelenggara



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan	4
1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan	5
1.4 Peserta Kegiatan.....	5
1.5 Susunan Acara	6
1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB II LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN.....	8
2.1 Konteks dan Tujuan Strategis.....	8
2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka	9
2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting.....	11
2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah	13
2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Diantisipasi	14
2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat.....	15
2.7 Kesimpulan.....	16
BAB III DOKUMENTASI KEGIATAN	19
3.1 Dokumentasi Kegiatan.....	19
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	25





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Acara	6
Tabel 1.2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan	7
Tabel 3.1 Dokumentasi Kegiatan.....	19



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) adalah badan pengelola investasi strategis yang mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama "Daya Anagata Nusantara" diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance. Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sorotan publik belakangan ini banyak mengarah kepada beleid yang ditujukan untuk memperbaiki penatalaksanaan Danantara, yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Beleid anyar tersebut mengatur pemisahan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan semua BUMN dari keuangan negara. Sebagian kalangan akademisi

menilai, kebijakan ini bisa membuka celah baru bagi penyelewengan dana publik. Celah tersebut dinilai dapat menciptakan "zona abu-abu" yang menumpulkan pengawasan dan pengendalian aset negara di BUMN yang selama ini masuk dalam kategori "kekayaan negara yang dipisahkan". Implikasi lain dari pengecualian tersebut adalah keuntungan atau kerugian investasi Danantara tidak secara otomatis dianggap sebagai keuntungan atau kerugian negara. Padahal, dalam beleid terbaru, BPI Danantara punya kewenangan "super" untuk mengelola dividen BUMN, memberikan persetujuan penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, hingga merestui penghapusan buku atau hapus tagih atas aset BUMN.

Dengan mandat BPI Danantara yang semakin luas, ruang fiskal memang masih ada potensi tertekan karena kas negara masih akan terbebani tugas menyalurkan PMN untuk BUMN dan BPI Danantara. Belum lagi hasil dividen yang selama ini masuk ke kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi berkurang atau bahkan dividen dialokasikan semua ke pengelolaan BPI Danantara.

Salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada PMN tunai adalah membuka keran pendanaan alternatif. BPI Danantara kini tengah merumuskan berbagai opsi agar perusahaan pelat merah tidak terus menerus bergantung pada kas negara. Namun, perlu diingat bahwa tak semua opsi bebas risiko. Beberapa skema pendanaan alternatif justru bisa menjadi beban baru jika tak dikelola dengan hati-hati. Karena itu, variasi sumber pendanaan di luar APBN dipandang penting untuk menahan penumpukan beban fiskal.

Bagi BPI Danantara sendiri, tantangannya justru berlapis. Sebagai lembaga investasi yang baru berdiri, BPI Danantara dituntut untuk menyalurkan modal secara tepat sasaran, menghindari penyelewengan, sekaligus memastikan BUMN tidak terlena dengan kemudahan akses dana. Berbagai macam risiko akan dihadapi BPI Danantara, mulai dari kegagalan/kerugian bisnis/investasi, fraud keuangan, dan tekanan dari kepentingan pihak tertentu. Selain itu juga adanya risiko operasional berupa utang jangka pendek, fluktuasi nilai tukar, dan beban bunga yang membengkak. Begitu juga dengan risiko tuntutan hukum dari mitra bisnis/investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Menanggapi berbagai permasalahan risiko tersebut, BPI Danantara memerlukan upaya tata kelola yang fundamental untuk dapat mempercepat transformasi BUMN yang benar benar didambakan oleh pemerintah. Transformasi BUMN bukan hanya sekedar jargon saja namun sebuah keniscayaan agar dapat melaksanakan mandat baru dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia.

Berangkat dari berbagai kondisi, tantangan dan urgensi yang telah dipaparkan di atas, diperlukan ruang dialog yang mampu mempertemukan para pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan dan perspektif, mengidentifikasi permasalahan lebih mendalam, serta merumuskan alternatif solusi yang relevan dan aplikatif bagi BPI Danantara. Atas dasar tersebut, Nagara Institute menyelenggarakan kegiatan Round Table Discussion (RTD) sebagai forum strategis untuk menggali pemahaman bersama, memperkuat kolaborasi dan menghasilkan input dan rekomendasi yang dapat

mendukung perumusan kebijakan maupun langkah tindak lanjut yang lebih efektif.

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) adalah untuk menghadirkan ruang dialog yang strategis antar pemangku kepentingan, akademisi, praktisi dan pihak terkait lainnya mengenai posisi BPI Danantara dalam ekosistem pengelolaan BUMN dan perekonomian nasional serta langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memperkuat kontribusinya.

Secara umum, diskusi ini juga bertujuan menggali informasi, pandangan dan usulan serta solusi atas pokok-pokok pertanyaan berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi dan tantangan fundamental dalam penatakelolaan BUMN yang berpotensi mempengaruhi pengelolaan BPI Danantara, mencakup keberlangsungan usaha, kesehatan keuangan, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki saat ini.
2. Menganalisis kebutuhan penguatan pada sisi input dan output kinerja BPI Danantara, meliputi kebutuhan strategis untuk memperkuat fondasi operasional dan investasi, serta langkah yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan dampak kinerja usaha.
3. Merumuskan strategi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan usaha sebagai prasyarat untuk

memastikan keberlangsungan dan tata kelola BPI Danantara yang sehat, modern, dan berdaya saing.

1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion (RTD)* “Menghitung Risiko dan Harapan Super Holding Danantara” diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
Waktu : 08.00 - 12.00 WIB
Tempat : Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta
(Ballroom Indraprasta 3)



Gambar 1.1 Flyer Kegiatan Round Table Discussion “Menghitung Risiko dan Harapan Super Holding BUMN Danantara”

1.4 Peserta Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion* ini melibatkan stakeholder terkait mulai dari perwakilan ahli, stakeholder BPI Danantara, di antaranya (daftar hadir terlampir):

1. Perwakilan Kepala Daerah dan Dinas DPMPTSP
2. Anggota Legislatif Kota Yogyakarta
3. Akademisi dan Ekonom Perguruan Tinggi DIY
4. Asosiasi Bisnis dan Investasi
5. Pelaku Usaha dan Praktisi Ekonomi

1.5 Susunan Acara

Tabel 1.1 Susunan Acara

No	Waktu	Durasi (Menit)	Acara	Narasumber/PIC
1	08.30 – 09.00	30	Registrasi Peserta & Penyambutan	Panitia Penyelenggara
2	09.00 – 09.05	5	Pembukaan oleh Master of Ceremony	Nabila Khoirunnisa
3	09.05 - 09.10	5	Pembukaan dan Pengantar oleh Direktur Eksekutif	Dr. Akbar Faizal, M.Si
4	09.10 - 09.30	20	Paparan Temuan Awal Tim Riset Nagara Institute	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. • Dr. R. Edi Soewandono, S.H., M.H
5	09.45 - 10.45	60	Paparan Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • H. M. Misbakhun, S.E., M.H • Ferry Latuhihin, S.E., M.B.A • Ir. Wijayanto Samirin, MPP • Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D
6	10.45 - 11.50	65	Diskusi Panel & Tanya Jawab	Peserta RTD dan Narasumber
7	11.50 - selesai		Penutupan, Foto Bersama & Makan Siang	

1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Matriks pelaksanaan kegiatan menyajikan tahapan dan jadwal terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	Desember					Januari		
	Minggu ke-							
	1	2	3	4	5	1	2	3
Persiapan Kegiatan								
Pelaksanaan Kegiatan								
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan								

BAB II

LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN

2.1 Konteks dan Tujuan Strategis

Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi nasional lintas daerah yang dirancang untuk menghimpun pandangan strategis, kritis, dan reflektif mengenai pembentukan serta operasionalisasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transformasi kelembagaan ini dipahami sebagai keputusan politik-ekonomi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menandai pergeseran paradigma pengelolaan BUMN dari entitas yang selama ini kerap dibebani kepentingan politis dan fiskal jangka pendek menuju entitas bisnis profesional yang diharapkan mampu beroperasi dengan standar global.

FGD di Yogyakarta diselenggarakan dengan pertimbangan karakter daerah sebagai pusat pemikiran akademik, pengembangan sumber daya manusia, serta basis ekonomi kreatif dan jasa berbasis pengetahuan. Forum ini bertujuan untuk memetakan secara komprehensif harapan dan risiko sistemik dari konsolidasi aset nasional di bawah Danantara, menilai efektivitas desain kelembagaan dan mekanisme investasi yang diusulkan, serta mengkaji implikasi transformasi ini terhadap ketahanan ekonomi nasional dan dinamika pembangunan daerah. Hasil diskusi dimaksudkan sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang berhati-hati, kredibel, dan berjangka panjang.

2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka

Diskusi mengidentifikasi sejumlah isu kunci yang membentuk pilar utama transformasi Danantara. Isu-isu ini mencerminkan perubahan mendasar dalam cara negara memposisikan BUMN, baik sebagai entitas bisnis maupun sebagai instrumen kebijakan publik.

A. Landasan Legalistik dan Desain Kelembagaan

Isu pertama berkaitan dengan landasan hukum dan desain kelembagaan Danantara yang lahir dari perubahan Undang-Undang BUMN. Perubahan ini menegaskan pemisahan peran antara Badan Pengaturan BUMN sebagai regulator dan BPI Danantara sebagai operator investasi sekaligus super holding operasional. Desain kelembagaan tersebut dipandang memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan aset dan investasi nasional, namun pada saat yang sama menuntut standar tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan model pengelolaan BUMN sebelumnya.

B. Konsolidasi Aset Nasional dan Daya Ungkit Ekonomi

Isu kedua adalah agenda konsolidasi aset nasional BUMN yang secara nominal diperkirakan mencapai Rp15.000-16.000 triliun. Konsolidasi ini diproyeksikan sebagai sarana untuk menciptakan daya ungkit ekonomi (leverage) dalam mendukung investasi berskala besar, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerja sama global, serta memungkinkan pembiayaan proyek strategis jangka panjang. Namun, diskusi menegaskan bahwa angka nominal tersebut perlu dibaca secara teknokratis, dengan membedakan antara total aset dalam neraca dan nilai bersih setelah memperhitungkan kewajiban utang, kualitas aset,

serta kemampuan aset tersebut menghasilkan arus kas yang berkelanjutan.

C. Reformasi Manajemen Dividen dan Akuntabilitas Korporasi

Isu ketiga berkaitan dengan reformasi manajemen dividen dan penguatan akuntabilitas korporasi BUMN. Optimalisasi dividen dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penyertaan modal negara. Dalam konteks ini, penghapusan rangkap jabatan pejabat negara di jajaran direksi dan komisaris dipahami sebagai langkah penting untuk memperkuat independensi manajemen dan meminimalkan konflik kepentingan. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip meritokrasi dalam penunjukan dan evaluasi kinerja manajemen.

D. Hilirisasi dan Kedaulatan Sumber Daya Strategis

Isu keempat menyangkut peran Danantara dalam agenda hilirisasi dan penguatan kedaulatan sumber daya strategis, khususnya di sektor energi dan mineral kritis. Danantara diproyeksikan sebagai instrumen negara untuk mengamankan kepentingan nasional melalui investasi jangka panjang, penguasaan rantai nilai strategis, serta pengembangan kemitraan global yang lebih setara. Dalam perspektif ini, Danantara diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada modal asing yang bersifat oportunistik dan mendorong penguatan basis industri nasional.

2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting

Diskusi mencerminkan spektrum pandangan yang luas dan sering kali berseberangan mengenai model dan implementasi Danantara. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa transformasi BUMN melalui Danantara bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, melainkan menyangkut pilihan strategis negara yang sarat implikasi ekonomi, fiskal, dan politik.

A. Perdebatan Model Sovereign Wealth Fund (SWF)

Salah satu perdebatan utama berkaitan dengan kesesuaian Danantara untuk diposisikan sebagai sovereign wealth fund (SWF). Pandangan pendukung melihat Danantara sebagai instrumen strategis dan geopolitik yang memungkinkan negara melakukan pooling fund internasional untuk mendukung kemandirian ekonomi nasional, memperkuat posisi tawar global, dan membiayai agenda pembangunan jangka panjang.

Sebaliknya, pandangan kritis menekankan bahwa sebagian besar SWF di negara lain dibangun di atas fondasi surplus fiskal dan neraca eksternal yang kuat, sementara Indonesia masih berada dalam kondisi APBN defisit. Dalam konteks ini, kekhawatiran muncul bahwa pemaksaan model SWF dapat mendorong penggunaan instrumen utang atau obligasi dalam skala besar, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan tekanan fiskal dan risiko keuangan di masa depan.

B. Valuasi Aset dan Risiko Sistemik Konsolidasi

Perdebatan lain menyoroti akurasi klaim valuasi aset BUMN yang menjadi basis konsolidasi Danantara. Besaran aset yang sangat besar dipandang tidak secara otomatis mencerminkan kekuatan finansial riil

apabila tidak disertai transparansi mengenai struktur utang, kualitas aset, serta kemampuan menghasilkan arus kas yang berkelanjutan. Diskusi menekankan pentingnya membedakan antara nilai aset dalam neraca (total assets) dan nilai bersih atau nilai ekonomi yang sesungguhnya dapat dimobilisasi.

Kekhawatiran khusus muncul terhadap risiko sistemik akibat konsentrasi pengelolaan aset dalam satu entitas. Kegagalan tata kelola di tingkat induk berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap stabilitas ekonomi nasional dan sektor keuangan, terutama apabila sektor perbankan BUMN terlibat secara signifikan dan kepercayaan publik terganggu.

C. Trade-off Strategis dalam Implementasi Danantara

Diskusi juga mengidentifikasi sejumlah trade-off strategis yang harus dikelola secara sadar oleh Danantara. Salah satunya adalah ketegangan antara akselerasi program pemerintah melalui dominasi BUMN dan kebutuhan untuk menjaga ruang tumbuh sektor swasta agar mekanisme inovasi, efisiensi pasar, dan proses creative destruction tetap berjalan.

Trade-off lain muncul antara visi investasi jangka panjang untuk membangun kedaulatan teknologi dan penguatan sumber daya manusia dengan tekanan kebutuhan stabilisasi ekonomi jangka pendek serta pencapaian target pertumbuhan tahunan. Selain itu, terdapat pertentangan antara upaya memaksimalkan nilai aset di tingkat pusat dan komitmen pemerataan manfaat ekonomi ke daerah. Diskusi menegaskan bahwa kegagalan mengelola trade-off ini secara seimbang

berisiko melemahkan legitimasi kebijakan Danantara dan mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional.

2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah

Dari perspektif daerah, diskusi menegaskan pentingnya keterkaitan nyata antara kebijakan Danantara dan pembangunan ekonomi lokal. Pelaku usaha daerah mempertanyakan posisi Danantara sebagai mitra atau kompetitor, serta menyoroti risiko apabila BUMN terus merambah sektor-sektor yang telah mampu dijalankan oleh swasta lokal, seperti perhotelan, konstruksi skala menengah, dan jasa non-strategis. Kekhawatiran juga muncul bahwa konsolidasi aset dan dividen di tingkat pusat dapat mengurangi likuiditas yang beredar di daerah, khususnya bagi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Yogyakarta dipandang memiliki keunggulan pada modal manusia, industri kreatif, pariwisata, serta ekonomi berbasis pengetahuan. Diskusi mengemukakan harapan agar Danantara tidak hanya berfokus pada investasi berbasis aset fisik, tetapi juga berperan dalam mendukung pengembangan soft power daerah melalui industri kreatif, teknologi, dan inovasi. Kemitraan dengan perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan pelaku usaha lokal dipandang penting agar kehadiran Danantara di daerah tercermin dalam penciptaan ekosistem ekonomi riil yang berkelanjutan, bukan sekadar simbol administratif.

2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Diantisipasi

A. Peluang Kebijakan

FGD mengidentifikasi sejumlah peluang kebijakan yang dapat dimanfaatkan melalui Danantara. Di antaranya adalah penciptaan multiplier effect melalui investasi pada sektor-sektor dengan hambatan masuk tinggi, peningkatan efisiensi dan profesionalisme BUMN melalui transformasi organisasi dan adopsi teknologi berbasis data, serta penyehatan fiskal melalui pengurangan ketergantungan BUMN pada penyertaan modal negara dan peningkatan kontribusi dividen bersih.

B. Risiko Operasional, Tata Kelola dan Fiskal

Namun, diskusi juga menegaskan berbagai risiko utama yang perlu diantisipasi secara serius. Risiko tersebut meliputi potensi elite capture dan praktik financial engineering yang tidak transparan, penggunaan instrumen utang yang berlebihan, serta beban fiskal jangka panjang akibat penugasan pemerintah yang tidak dikompensasi secara memadai.

Forum mengidentifikasi sedikitnya lima batu sandungan operasional utama yang berpotensi menghambat efektivitas Danantara sejak tahap awal implementasi, yaitu: rendahnya likuiditas aset akibat dominasi aset tetap yang sulit dimobilisasi; keterbatasan modal kerja efektif yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai nominal aset konsolidasian; masuknya BUMN dengan kondisi keuangan lemah tanpa restrukturisasi mendasar; potensi penggerusan nilai aset sebelum proses optimalisasi akibat tata kelola yang lemah di masa lalu; serta kompleksitas restrukturisasi korporasi lintas sektor yang memerlukan waktu panjang dan disiplin kebijakan tinggi.

Diskusi juga mencatat bahwa ketidakpastian hukum dan kaburnya batas definisi kerugian negara tidak hanya menimbulkan risiko personal bagi pengelola, tetapi berpotensi menciptakan efek jera institusional (*chilling effect*) terhadap pengambilan keputusan bisnis yang rasional dan profesional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan daya saing Danantara sebagai entitas investasi profesional yang membutuhkan keberanian mengambil risiko terukur.

2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat

Diskusi menghasilkan sejumlah catatan strategis bagi Pemerintah Pusat yang dipandang krusial untuk memastikan kredibilitas dan keberlanjutan Danantara sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional. Pertama, pentingnya memprioritaskan prinsip meritokrasi dalam penunjukan jajaran direksi dan komisaris di seluruh level BUMN, dengan seleksi berbasis kompetensi profesional, integritas, dan rekam jejak kinerja, serta bebas dari kepentingan politik jangka pendek.

Kedua, forum menekankan bahwa penerapan transparansi tidak cukup berhenti pada prinsip umum, tetapi perlu diwujudkan melalui standar pelaporan keuangan konsolidasi yang rutin, terjadwal, dapat diperbandingkan, dan diaudit secara independen dengan kredibilitas tinggi. Praktik ini dipandang sebagai prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik dan pasar, sekaligus mencegah tersembunyinya kewajiban dan risiko di balik kinerja keuangan yang tampak baik di atas kertas.

Ketiga, perlunya pemisahan yang tegas antara fungsi komersial dan penugasan negara (*public service obligation*), dengan mekanisme

pembiayaan yang transparan melalui APBN agar tidak menggerus modal investasi dan kapasitas pertumbuhan Danantara dalam jangka panjang.

Keempat, sebagai langkah mitigasi risiko, diskusi mengusulkan pembentukan mekanisme pengawalan independen berbasis data dan sistem peringatan dini untuk memantau kesehatan investasi, tata kelola, serta eksposur risiko Danantara secara berkelanjutan. Pendekatan ini dipandang penting untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mencegah akumulasi risiko sistemik dalam skala besar.

Dalam jangka panjang, forum mendorong agar Danantara memfokuskan sumber dayanya pada sektor-sektor strategis yang mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang, serta secara bertahap menarik diri dari bisnis non-strategis yang telah mampu dijalankan secara efisien oleh sektor swasta.

2.7 Kesimpulan

Diskusi di Yogyakarta menegaskan bahwa pembentukan BPI Danantara merupakan transformasi kelembagaan berskala besar yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai restrukturisasi korporasi BUMN, melainkan sebagai reposisi peran negara dalam perekonomian nasional. Danantara mengandung potensi strategis untuk memperkuat kapasitas investasi negara, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset publik, serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang melalui konsolidasi dan profesionalisasi BUMN. Dalam kerangka ini, Danantara dipandang sebagai instrumen yang berpotensi mengurangi

ketergantungan struktural terhadap APBN sekaligus membuka ruang pembiayaan baru bagi proyek-proyek strategis nasional.

Namun demikian, diskusi juga menegaskan bahwa besarnya skala dan fleksibilitas kewenangan Danantara secara inheren membawa risiko sistemik yang signifikan. Konsentrasi aset, penggunaan instrumen utang, serta kaburnya batas antara fungsi komersial dan penugasan negara berpotensi menimbulkan kerentanan fiskal dan tata kelola apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Risiko elite capture, politisasi manajemen, dan kriminalisasi kebijakan dipandang sebagai tantangan nyata yang dapat menghambat profesionalisme serta kualitas pengambilan keputusan bisnis.

Dari perspektif daerah, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besaran aset atau imbal hasil investasi, tetapi dari kemampuannya menciptakan dampak ekonomi riil yang inklusif dan berkelanjutan. Keterkaitan dengan ekosistem ekonomi lokal, ruang kemitraan yang sehat bagi sektor swasta daerah, serta distribusi manfaat yang adil menjadi prasyarat penting agar konsolidasi di tingkat pusat tidak berujung pada pemusatan nilai tambah yang berlebihan.

Secara keseluruhan, FGD ini menyimpulkan bahwa Danantara merupakan kebijakan berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil yang juga tinggi. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas desain tata kelola, konsistensi implementasi meritokrasi, kejelasan mandat kebijakan, serta disiplin negara dalam mengelola risiko operasional, hukum, dan fiskal sejak tahap awal implementasi. Tanpa prasyarat tersebut, Danantara berisiko mereproduksi persoalan struktural lama dalam skala yang lebih besar. Sebaliknya, dengan tata kelola yang

kredibel dan disiplin kebijakan yang kuat, Danantara berpeluang menjadi instrumen transformasi ekonomi nasional yang strategis dan berkelanjutan.



BAB III

DOKUMENTASI KEGIATAN

3.1 Dokumentasi Kegiatan

Tabel 3.1 Dokumentasi Kegiatan

<p>1. Registrasi Peserta & Penyambutan</p>  <p>Gambar 3.1 Registrasi Peserta</p>	
<p>2. Pembukaan Acara oleh MC</p>  <p>Gambar 3.2 Pembukaan Acara oleh MC Nabila Khoirunnisa</p>	 <p>Gambar 3.3 Pembukaan Acara oleh MC Nabila Khoirunnisa</p>
<p>3. Pembukaan oleh Host</p>  <p>Gambar 3.4 Pembukaan Sesi Round Table Discussion oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si</p>	 <p>Gambar 3.5 Pembukaan Sesi Round Table Discussion oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si</p>

4. Pemaparan Hasil Riset oleh Peneliti Nagara Institute



Gambar 3.6 Pemaparan Hasil Riset oleh Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H



Gambar 3.7 Pemaparan Hasil Riset oleh Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H

5. Pemaparan oleh Narasumber



Gambar 3.8 Paparan dari Prof. Wihana Kirana Jaya - Ekonom FEB Universitas Gadjah Mada



Gambar 3.9 Paparan dari Mukhamad Misbakhun - Ketua Komisi XI DPR RI



Gambar 3.10 Paparan dari Ferry Latuhihin, M.Sc - Pakar Ekonomi



Gambar 3.11 Paparan dari Ir. Wijayanto Samirin - Praktisi Kebijakan Publik dan Ekonom

6. Diskusi Panel dan Tanya Jawab



Gambar 3.12 Tanggapan dari Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng - Rektor Universitas Gadjah Mada 2017 - 2022



Gambar 3.14 Tanggapan dari Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., [M.Si](#), Ak. CA., ACPA - Dekan FEB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Gambar 3.16 Tanggapan dari Bapak Sigit Nurcahyo - Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta



Gambar 3.13 Tanggapan dari Ibu Ekawati Rahayu Putri - Ketua HIPMI DIY



Gambar 3.15 Tanggapan dari Kusmintarja Yatendra, S.E - Sekretaris DPD Perbarindo DIY



Gambar 3.17 Tanggapan dari Bapak Muhammad Dian Revindo, Ph.D

7. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Kegiatan



Gambar 3.18 Foto Bersama Peneliti dan Narasumber



Gambar 3.19 Foto Bersama Peneliti dan Narasumber

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan *Round Table Discussion* “Menghitung Risiko dan Harapan Super Holding BMN Danantara” telah terlaksana dengan baik dan memberikan masukan yang konstruktif bagi penguatan kebijakan reformasi Badan Usaha Milik Negara. Diskusi yang diselenggarakan di Yogyakarta ini, dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku bisnis, memperkaya perspektif mengenai potensi dan risiko pembentukan BPI Danantara dari sudut pandang pusat maupun daerah.

Harapan terhadap peningkatan kapasitas investasi, efisiensi pengelolaan aset publik, dan pembiayaan pembangunan jangka panjang hanya dapat diwujudkan apabila diimbangi dengan tata kelola yang kredibel, kehati-hatian fiskal, serta pemisahan yang tegas antara kepentingan bisnis dan penugasan negara. Diskusi ini juga menggarisbawahi pentingnya memastikan agar transformasi di tingkat pusat mampu menghadirkan dampak ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkeadilan hingga ke daerah. Dengan demikian, masa depan Danantara akan sangat ditentukan oleh konsistensi negara dalam menegakkan prinsip profesionalisme, meritokrasi, dan disiplin kebijakan.

Rekomendasi kebijakan yang dirangkum dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan reformasi BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Keterlibatan pemerintah daerah serta sinergi antara BUMN dan pelaku usaha daerah perlu terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai penutup, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai rujukan dalam proses pengambilan kebijakan ke depan. Diharapkan kegiatan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan kebijakan reformasi BUMN serta mendukung pembangunan ekonomi nasional dan daerah.



DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Hadir Kegiatan
- Laporan PR Value (Media Online, Media Cetak dan TV)
- Laporan Sosial Media Handling
- Laporan Amplifikasi Media Sosial
- Materi Kegiatan